



Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sikka

INFO PENULIS

Markus Kristian Retu
Universitas Nusa Nipa
tianslash@gmail.com
+6281246377123

Intan Mustafa
Universitas Nusa Nipa
Intanmustafa15@gmail.com
+6282145392334

Maria Elasilva Blandina
Universitas Nusa Nipa
hahahahuu75@gmail.com
+62 822-3698-6452

Lodowik Nikodemus Kedoh
Universitas Nusa Nipa
jekjoy08@gmail.com
081237966511

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Retu, M. K., Mustafa, I., Blandina, M. E., & Kedoh, L. N. (2026). Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sikka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 130-136.

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan IKD sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka, serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan masyarakat pengguna layanan, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, kemudahan akses dokumen kependudukan, serta pengurangan ketergantungan pada dokumen fisik. Namun demikian, implementasi IKD belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum maksimalnya kegiatan sosialisasi. Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi turut memengaruhi tingkat penerimaan terhadap layanan berbasis digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan institusional, dukungan kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperluas edukasi publik guna mengoptimalkan penerapan IKD di Kabupaten Sikka.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan

Abstract

Digital Population Identity (DPI) is an innovation in population administration services developed by the government as part of the digital transformation of public services. This study aims to analyze the implementation of Digital Population Identity as an innovation in population administration services in Sikka Regency and to identify the benefits and challenges encountered in its implementation. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with officials of the Population and Civil Registration Office of Sikka Regency and community members as service users, direct observation of service processes, and documentation review. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Digital Population Identity contributes positively to improving service efficiency, facilitating access to population administration documents, and reducing dependence on physical documents. However, the implementation has not yet been fully optimized due to limitations in technological infrastructure, the readiness of human resources, low levels of digital literacy among the community, and insufficient policy socialization. In addition, public concerns regarding the security of personal data affect the level of acceptance of digital-based services. This study concludes that the successful implementation of Digital Population Identity is determined not only by technological aspects but also by institutional readiness, policy support, and active community participation. Therefore, sustained efforts are required to strengthen infrastructure, enhance the capacity of public service personnel, and expand public education to optimize the implementation of Digital Population Identity in Sikka Regency.

Key Words: Digital Population Identity, Public Service, Population Administration

A. Pendahuluan

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, seperti kepemilikan identitas resmi dan akses terhadap berbagai layanan publik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, jarak geografis, hingga ketergantungan pada dokumen kependudukan dalam bentuk fisik.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu unsur krusial dalam pembangunan negara karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan berbagai layanan kependudukan, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, serta layanan administrasi lainnya yang menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut, khususnya kelompok rentan. Masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok lainnya kerap menghadapi kendala berupa kondisi geografis yang sulit dijangkau, prosedur pelayanan yang kompleks, serta keterbatasan informasi dan akses terhadap teknologi (Da Silva et al. 2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat, khususnya melalui penyelenggaraan pelayanan yang menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Pelayanan publik pada dasarnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat di setiap negara, yang dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan kepada pengguna layanan dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sedangkan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan pelayanan yang harmonis dan nyaman bagi kedua belah pihak, pelayanan publik perlu berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dilayani (Sadipun et al. 2024).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah, pola pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional dinilai kurang efektif. Proses pelayanan yang memerlukan kehadiran langsung, antrean panjang, serta risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik menjadi permasalahan yang sering dijumpai. Kondisi ini menuntut

adanya inovasi pelayanan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. IKD merupakan identitas resmi penduduk dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik, sehingga diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kependudukan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, setiap penduduk kini dimungkinkan untuk memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan berbagai dokumen yang memerlukan data kependudukan, tanpa harus membawa dokumen fisik, melainkan cukup menampilkan data tersebut melalui perangkat gawai berbasis Android. Penerapan Identitas Kependudukan Digital dilakukan melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan oleh penduduk Indonesia melalui smartphone. Selain memberikan kemudahan akses, IKD juga berpotensi menekan biaya negara, khususnya dalam hal pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selama ini memerlukan anggaran besar. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan serta tujuan dan manfaat penggunaan IKD itu sendiri (Lestari et al. 2025)

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan negara karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), termasuk Disdukcapil Kabupaten Sikka, memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan berbagai layanan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya yang menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Sebagai instansi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Disdukcapil dituntut untuk memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Sadipun et al. 2024).

Digitalisasi memberikan peluang besar bagi terwujudnya keterbukaan informasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat menekan praktik korupsi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pendukung, melainkan menjadi elemen utama dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut mendefinisikan data kependudukan sebagai data perseorangan maupun data agregat yang terstruktur dan dihasilkan melalui kegiatan pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil, sekaligus menegaskan pentingnya landasan regulasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Krishna et al. 2025).

Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, yang menghadapi hambatan berupa kondisi geografis, prosedur pelayanan yang kompleks, keterbatasan informasi, serta akses terhadap teknologi. Selain itu, keluhan masyarakat terkait lamanya proses pelayanan, kurangnya kejelasan informasi, dan sikap aparaturnya yang dinilai kurang ramah masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara yuridis, Identitas Kependudukan Digital merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam bentuk digital yang memuat informasi kependudukan dan data balikan, yang disajikan melalui aplikasi digital pada perangkat gawai. IKD menampilkan data pribadi sebagai identitas resmi penduduk dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (2) tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan

Digital. Penerapan IKD bertujuan untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempermudah serta mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat secara digital, serta menjamin keamanan kepemilikan identitas kependudukan melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data (Lestari et al. 2025).

Penerapan IKD di Kabupaten Sikka menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui IKD, proses verifikasi data kependudukan dapat dilakukan dengan lebih cepat, penggunaan dokumen fisik dapat dikurangi, serta pelayanan menjadi lebih fleksibel. Namun demikian, implementasi IKD di tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Selain kesiapan aparatur, penerimaan masyarakat terhadap layanan berbasis digital juga menjadi faktor penentu keberhasilan IKD. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD berpotensi menghambat optimalisasi layanan ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai efektivitas penerapan IKD di Kabupaten Sikka.

Pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat modern yang mencerminkan hubungan antara negara sebagai penyedia layanan dan warga negara sebagai penerima layanan. Meningkatnya tuntutan masyarakat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kinerja layanan secara adil dan menyeluruh tanpa diskriminasi. Dalam konteks era digital, penerapan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko diskriminasi, ketidakpastian waktu dan biaya pelayanan, serta praktik pungutan liar (Rahmawati et al. 2024).

Penelitian mengenai Identitas Kependudukan Digital sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis implementasi, tetapi juga menelaah manfaat, kendala, serta persepsi masyarakat terhadap penggunaan IKD dalam pelayanan kependudukan. Lebih jauh, penelitian ini juga berperan sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi implementasi IKD agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sikka.

Inovasi pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses penciptaan dan penerapan gagasan-gagasan baru yang bersifat kreatif dalam penyelenggaraan layanan publik, yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik serta mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Penerapan inovasi dalam layanan publik berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Oleh karena itu, setiap inovasi pelayanan publik perlu berlandaskan pada upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, dengan tetap berorientasi pada kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik (Zulmawati et al. 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, digitalisasi administrasi kependudukan melalui IKD merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan publik menuju pemerintahan berbasis elektronik. Digitalisasi layanan publik menjadi tuntutan di era teknologi informasi guna menciptakan birokrasi yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Administrasi kependudukan sebagai pelayanan dasar memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta penyelenggaraan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan memiliki implikasi yang luas bagi tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka tidak hanya relevan pada tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pelayanan publik di tingkat nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai inovasi pelayanan publik berbasis digital serta menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan administrasi kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata di lapangan terkait proses penerapan IKD, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi oleh penyelenggara dan pengguna layanan. Melalui desain ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pelayanan IKD dalam konteks pelayanan publik di tingkat daerah.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sikka. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan IKD, serta masyarakat pengguna layanan IKD yang dianggap mampu memberikan informasi terkait pengalaman, persepsi, dan kendala dalam penggunaan layanan tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk memperoleh data terkait pelaksanaan IKD, kendala teknis dan nonteknis, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan IKD di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelusuran dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta data pendukung lainnya yang relevan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik, implementasi IKD, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kondisi dan proses pelayanan IKD di lapangan, sedangkan daftar dokumentasi berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait efektivitas Identitas Kependudukan Digital sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sikka merupakan manifestasi dari kebijakan nasional terkait transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui regulasi Kementerian Dalam Negeri. Namun, dalam praktiknya, penerapan IKD di tingkat daerah menunjukkan adanya jarak antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem pendukung di daerah. Kondisi geografis Kabupaten Sikka yang terdiri dari wilayah pesisir, perbukitan, dan desa-desa terpencil menjadi tantangan struktural dalam penyediaan layanan digital. Keterbatasan jaringan internet dan kualitas infrastruktur teknologi informasi menyebabkan pemanfaatan IKD belum dapat dilakukan secara merata. Situasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik berpotensi menciptakan ketimpangan akses apabila tidak disertai kebijakan afirmatif bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian, penerapan IKD perlu dipahami sebagai proses bertahap yang menyesuaikan dengan kondisi lokal.

Dari perspektif efisiensi pelayanan, IKD menawarkan kemudahan akses dan percepatan proses administrasi kependudukan. Penggunaan identitas digital memungkinkan verifikasi data dilakukan secara cepat tanpa ketergantungan pada dokumen fisik, sehingga mengurangi waktu

tunggu dan beban administratif baik bagi masyarakat maupun aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang telah memanfaatkan IKD merasakan manfaat berupa kemudahan dan fleksibilitas pelayanan. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara luas karena tingkat adopsi IKD masih terbatas. Rendahnya tingkat pemanfaatan IKD oleh masyarakat berkaitan erat dengan literasi digital yang belum merata. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia dan masyarakat berpenghasilan rendah, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat digital dan aplikasi berbasis gawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial dan kultural masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa intervensi berupa edukasi dan pendampingan, inovasi digital berpotensi menjadi eksklusif dan tidak inklusif.

Selain faktor masyarakat, kesiapan sumber daya manusia aparatur juga menjadi penentu keberhasilan implementasi IKD. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa aparatur Disdukcapil Kabupaten Sikka masih memerlukan peningkatan kompetensi, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan pelayanan berbasis digital. Aparatur yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan teknologi berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian integral dari inovasi pelayanan publik.

Dalam konteks kualitas pelayanan publik, penerapan IKD memiliki implikasi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Proses pelayanan yang terdigitalisasi cenderung lebih terstandar dan terdokumentasi, sehingga dapat meminimalkan praktik penyimpangan seperti pungutan liar dan perlakuan diskriminatif. Digitalisasi juga memungkinkan pelacakan proses pelayanan secara lebih terbuka. Namun demikian, peningkatan transparansi ini belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Kepercayaan masyarakat menjadi isu krusial dalam implementasi IKD, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Sebagian masyarakat masih menunjukkan keraguan terhadap penyimpanan data kependudukan dalam sistem digital, yang dianggap rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Kekhawatiran ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keamanan data yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik perlu dilakukan melalui transparansi kebijakan perlindungan data dan komunikasi publik yang efektif.

Sosialisasi kebijakan IKD di Kabupaten Sikka dinilai belum optimal baik dari segi intensitas maupun jangkauan. Sosialisasi yang masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat di daerah pedesaan belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat IKD. Keterbatasan metode sosialisasi juga memengaruhi efektivitas penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik memerlukan strategi komunikasi yang inklusif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Dalam kerangka inovasi pelayanan publik, IKD seharusnya tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi dokumen identitas, tetapi sebagai bagian dari transformasi sistem pelayanan secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Sikka masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Padahal, integrasi data kependudukan berpotensi mendukung pelayanan lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Ketidakefektifan integrasi ini membatasi potensi strategis IKD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Penerapan IKD juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain dapat memperlebar kesenjangan pelayanan apabila tidak disertai kebijakan inklusif. Kelompok rentan berisiko tertinggal dalam mengakses layanan berbasis digital. Oleh karena itu, implementasi IKD perlu disertai mekanisme pelayanan alternatif dan kebijakan afirmatif agar seluruh masyarakat tetap memperoleh hak pelayanan secara setara.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi IKD merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan institusional, kapasitas aparatur, serta penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penerapan IKD perlu bersifat holistik, menggabungkan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan secara simultan. Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sikka telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan administrasi kependudukan. Namun, berbagai tantangan yang masih dihadapi menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih adaptif dan inklusif. Optimalisasi IKD memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas aparatur, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penguatan perlindungan data pribadi guna membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, IKD dapat berfungsi tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai

instrumen strategis dalam transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Kesimpulan

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sikka merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Secara konseptual dan regulatif, IKD memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses administrasi, pengurangan ketergantungan pada dokumen fisik, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Sikka belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya sosialisasi kebijakan IKD. Kondisi geografis dan perbedaan tingkat akses teknologi turut memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan ini, sehingga manfaat IKD belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dalam sistem digital masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Keraguan terhadap perlindungan data dan minimnya pemahaman mengenai mekanisme keamanan IKD berpotensi menghambat penerimaan masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Hal ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan komunikasi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Identitas Kependudukan Digital sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, kesiapan institusi, dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan sosialisasi yang inklusif, serta penguatan perlindungan data pribadi agar IKD dapat berfungsi secara optimal. Apabila tantangan tersebut dapat diatasi, IKD berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

E. Referensi

- Da Silva, W. C. Z. F., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2024). Komunikasi dalam Inovasi "Jalan MANTAN" Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Rangka Pemenuhan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2106-2113.
- Krishna, I. A., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). Penerapan E-Government dalam Layanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 464-474.
- Lestari, S. R., & Rijali, S. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjung. *JAPB*, 8(1), 521-540.
- Rahmawati, L., Agus, S. A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik* 1(1)
- Sadipun, M. M. S., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2024). Peran Komunikasi Interpersonal dalam Mendukung Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2114-2120.
- Zulmawati, ., & Mubarak, A. (2025). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Melalui Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. *AL-DYAS Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4,1643-63.